

Kamis, 5 Oktober 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Empat BUMN Kerugian Rp 300 Miliar
Nama Media	Jateng Pos
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg1&11
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

Empat BUMN Kerugian Rp 300 Miliar

Dugaan Korupsi Dana Pensiun

JAKARTA - Menteri BUMN Eric Thohir dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh resmi menyerahkan hasil audit dana pendan dari empat instansi BUMN bermasalah kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Akibat dugaan tindak korupsi ini negara menanggung kerugian Rp 300 miliar.

"Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang terampil, dan hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang bodoh."

"Tetapi adalah untuk
pentunasan. Berman-
gim dari pentunasan
yang sedikit, mudah-
saja disalahgu-
nakan oleh oknum-
oknum tertentu, in-
sampet menyakiti-
kan."

COMPTON

ST BURMAN.COM

[illegible]

■ **Best of SPAT SUMM**... Vol. 11



PEMBERAN PERKARA: Menek BUMN Erik Thori; Kepala BPKP Muhamad Yusuf Azzah, dan Zakke Agung ST Butarsocki mengantisipasi kelestarian perikanan rakyat perikanan rakyat. (Dua Pemasukan BSM). Selasa (3/10).

Empat BUMN

dari hal 1

Tidak menutup kemungkinan angka kerugian negara bisa lebih dari itu.

"Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," tegas Erick.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menambahkan audit tujuan tertentu yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari permintaan Erick. Pihaknya menilai akuntabilitas pengelola, dan identifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Yusuf mengungkapkan, dari empat sampling dana pensiun BUMN tersebut, BP-KP mengambil sampling transaksi investasi 10 persen dengan total sekurang-kurangnya sekitar Rp 1,12 triliun.

"Kami menemukan memang transaksi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, bahkan dari 4 ini dua dana penstun ada indikasi fraud," lanjutnya.

laksu Agung ST Burhanuddin memastikan akan membasmi BUMN yang menjadi sarang korupsi. Hal ini me-

nyusul program bersih-bersih perusahaan pelat merah yang tengah digencarkan Kementerian BUMN.

Upaya bersih-bersih BUMN, kata Burhanuddin, dimulai dari dana pensiun BUMN. Pihaknya baru menerima hasil audit Kementerian BUMN dan BPKP terkait 4 dana pensiun yang merugikan negara Rp 400 miliar.

Pak Menteri menyampaikan kerugian sekitar Rp 300 miliar, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal, baru 10 persen penghitungannya, ini bisa berkembang terus," ucapnya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung Selasa (3/10).

Empat yang sudah diaudit adalah Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau IDFOOD. Dari empat perusahaan, diduga ada dua dana pensiun yang terindikasi fraud alias korupsi.

"Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dan ini adalah sangat menyakitkan," tegas Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan akan terus mendukung upaya Menteri BUMN. Dengan koordinasi bersama Kementerian BUMN dan BFKP dia berharap seluruh perusahaan pelat merah menjadi perusahaan dengan tata kelola yang baik.

"Tujur saja masih ada dan banyak, bukan hanya dana pensiun saja. Tapi kami dahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami yang di Kejagung yang menyetor bakti hidup orang banyak itu yang kami dahulukan," tuturnya, dilansir dari kompas.com.

Erick Thohir menambahkan, kolaborasi pemerintah, BPKP dan Kejaksaan Agung saat ini melanjutkan penyelesaian kasus di tubuh BUMN sebahannya, seperti Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan Asabri.

"Program BUMN ini konteksnya bukan membenarkan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan di mana kami sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional," tandasnya. (kum/muz)

Judul	PPPK KSB Bisa Punya Dana Pensiun
Nama Media	Suara NTB
Newstrend	Taspen Life fasilitasi Dana Pensiun PPPK
Halaman/URL	Pg12
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Positive

PPPK KSB Bisa Punya Dana Pensiun

Taliwang (Suara NTB) -

Meski masa kerjanya tidak sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini tetap punya kesempatan menikmati dana pensiun.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Malik menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyediakan fasilitas dana pensiun bagi tenaga PPPK. Setiap PPPK yang ingin mendapatkan dana purna tugas itu, pemerintah memfasilitasinya bekerja sama dengan Taspen Life. "Kalau mereka mau punya dana pensiun kita fasilitasi dengan Taspen Life," katanya.

Diakui H. Malik, dana pensiun bagi tenaga PPPK itu sifatnya masih berupa pilihan. Artinya PPPK bersangkutan tidak secara wajib atau otomatis terdaftar menjadi peser-

ta asuransi di Taspen Life saat mereka diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Jadi pilihan mereka. Tidak ikut juga tidak apa-apa ya. Tapi tentunya mereka tidak punya dana pensiun nantinya," paparnya.

Keberadaan fasilitas asuransi untuk dana pensiun PPPK di taspen Life itu, diungkapkan H. Malik untuk di KSB cukup diminati. Ini terlihat pada pengangkatan PPPK terbaru, sebanyak 232 orang yang menerima SK seluruhnya menyatakan bersedia menjadi peserta asuransi dana pensiun itu. "Kami tidak mengarahkan mereka karena itu kan pilihan masing-masing. Tapi mereka yang kemudian kompak ikut semuanya," sebutnya.

Secara aturan, seorang tenaga PPPK dapat dikontrak minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah 5 tahun. Namun

demikian untuk perpanjangan kontrak pasca 5 tahun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut H. Malik persyaratan yang wajib dipenuhi itu berkutat pada hasil penilaian kinerja dan disiplin tenaga PPPK bersangkutan. Bahkan penilaian itu juga menjadi dasar durasi kontrak tenaga PPPK setiap tahunnya. "Misal pada pengangkatan pertama mereka kan kontraknya per tahun seperti CPNS. Andai saja ada yang penilaiannya kurang maka saat itu mereka bisa jadi tidak dilanjutkan kontraknya setelah setahun," tandasnya.

"Secara sederhana penilaian kinerja kepegawaian itu kan kalau tidak mencapai 85 persen di bawah 50 persen maka bisa dihukum sedang dan berat. Dan kalau PPPK bisa juga tidak diperpanjang kontraknya," tambah H. Malik. **(bug)**

Judul	Dana Pensiun Dikelola BUMN dalam Kondisi Sakit
Nama Media	Jambi Independent
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg1&2
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral



(JANTAPACAR Y RUSMANIATY)
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat menyampaikan keterangan pers terkait dana pensiun BUMN bermasalah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Dana Pensiun Dikelola BUMN dalam Kondisi Sakit

Erick Thohir Serahkan Hasil Audit ke Kejagung

JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus memperdalam upaya "bersih-bersih" di seluruh perusahaan milik negara, termasuk fokus pada pengelolaan dana pensiun BUMN. "Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir bahwa ada persoalan yang

sama pada dana pensiun BUMN," kata Erick dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa.

Berdasarkan pada kecurigaannya itu, Erick pun memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai dana pensiun BUMN. ■

Baca **Dana Pensiun** hal 2

Dana Pensiun Dikelola BUMN -----dari hal 1

Hasilnya, lanjut Erick, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 di antaranya atau 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.

Atas temuan itu, dia pun meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, menurut Erick, dilakukan secara bertahap di mana pada tahap awal dilaksanakan pada empat dana pensiun BUMN.

Keempat dana pensiun tersebut, kata Erick, mengalami kerugian senilai Rp300 miliar yang diduga karena penyimpangan pada investasi.

"Inimat sangat mengecewakan. Pekerja yang telah bekerja puluhan tahun, masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," tegasnya.

Oleh karena itu, dia meminta jaksa agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun tersebut tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu, seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," ujar Erick Thohir.

Atas perkembangan itu, dia pun menyampaikan

terima kasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu audit dana pensiun BUMN tersebut.

Erick mengungkapkan sekitar 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN saat ini dalam kondisi sakit.

"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu, 70 persen sakit atau 34 (dana pensiun) bisa dinyatakan tidak sehat," kata Erick kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

Erick menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka program bersih-bersih BUMN.

Ia mencurigai ada indikasi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN.

Untuk itu, kata Erick, bersama dengan wakil menteri BUMN, asisten menteri dan Dirtipid membentuk tim untuk meneliti ulang apakah kecurigaan tersebut benar adanya atau tidak.

"Karena itu dengan Bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal, saya sampaikan indikasi tersebut waktu itu, kemudian bersama-sama mendorong BPKP memastikan angka-angka ini," ujar Erick.

Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menambahkan awalnya ada empat dana pensiun BUMN yang dilakukan audit, yakni Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan RNI atau ID Pood.

"Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka pihak BPKP dan kejaksaan, artinya angka ini bisa besar lagi," ujar Erick.

Ia menyerahkan hasil audit empat dana pensiun BUMN itu kepada Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan dalam rangka bersih-bersih BUMN.

Erick percaya Kejaksaan Agung mempunyai komitmen seperti penuntasan kasus korupsi lainnya di BUMN tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat seluruh oknum yang memang sangat merugikan para pensiunan, yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna," kata Erick.

Erick menambahkan dirinya dan Kementerian BUMN selalu mendukung Kejaksaan Agung dan BPKP untuk membantu program bersih-bersih BUMN. (ANTARA)

Judul	Erick Minta Jaksa Agung Jangan Ragu
Nama Media	Malang Posco Media
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

Erick Minta Jaksa Agung Jangan Ragu

Lanjutkan 'Bersih-bersih' BUMN

MALANG POSCO MEDIA, JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus memperdalam upaya "bersih-bersih" di seluruh perusahaan milik negara, termasuk fokus pada pengelolaan dana pensiun BUMN. "Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir bahwa ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN," kata Erick dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa kemarin.

Berdasarkan pada kecurigaannya itu, Erick pun memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai dana pensiun BUMN. Hasilnya, lanjut Erick, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 di



KONFERENSI PERS BERSAMA: Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan keterangan di Kejaksaan Agung, Selasa (3/10) kemarin.

antaranya atau 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.

Atas temuan itu, dia pun meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, menurut Erick, dilakukan secara bertahap di mana pada tahap awal dilaksanakan pada

empat dana pensiun BUMN. Keempat dana pensiun tersebut, kata Erick, mengalami kerugian senilai Rp300 miliar yang diduga karena penyimpangan pada investasi. "Ini amat sangat mengecewakan. Pekerja yang telah bekerja puluhan tahun, masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," tegasnya.

Oleh karena itu, dia meminta jaksa agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun tersebut tanpa pandang bulu. "Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu, seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," ujar Erick Thohir. Atas perkembangan itu, dia pun menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu audit dana pensiun BUMN tersebut. (ntr/nug)

Judul	Prudential Indonesia Lakukan ESG dan Health Webinar untuk Wujudkan Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat
Nama Media	Bhirawa
Newstrend	ESG & Health Webinar Prudential Indonesia
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Positif

Prudential Indonesia Lakukan ESG dan Health Webinar untuk Wujudkan Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat



Jakarta, Bhirawa

Dalam rangka Hari Ozon Internasional yang diperingati pada September lalu, Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan wawasan baik karyawan maupun nasabah dan masyarakat umum.

Aktivitas yang dilakukan adalah sesi ESG dan Health Webinar yang meningkatkan keterampilan karyawan dalam melestarikan lingkungan untuk mengurangi dampak dari polusi udara.

Selain itu, perusahaan juga melakukan edukasi kepada nasabah dan masyarakat umum melalui acara Customer Gathering dan Health Series di media sosial Prudential Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan pernapasan di tengah maraknya polusi

udara yang sedang terjadi.

Hal ini ditujukan sebagai tindakan preventif yang dilakukan mengingat semakin meningkatnya keluhan masyarakat terkait ISPA akhir-akhir ini.

Kegiatan ini mempertegas komitmen Prudential Indonesia dalam menerapkan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) selama lebih dari 27 tahun beroperasi di Indonesia, sekaligus berkontribusi bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustain-

able Development Goals/SDGs).

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen mengatakan, kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal penting yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga perlu berjalan selaras.

"Tanpa lingkungan yang sehat, masyarakat tidak dapat menikmati hidup yang sehat dan berkualitas, seperti banyaknya pemberitaan tentang keluhan kesehatan yang muncul karena dampak polusi belakangan ini," katanya.

Menurut Karin Zulkarnaen melalui kegiatan-kegiatan ini Prudential Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi masyarakat dan generasi mendatang dengan menjalan-

kan bisnis yang berkelanjutan.

"Selain itu, sebagai langkah preventif seria wujud komitmen berkelanjutan dalam mengajak masyarakat senantiasa mengedepankan hidup yang sehat untuk masa depan lebih baik," jelasnya.

Karin Zulkarnaen juga menjelaskan program khusus vaksinasi PCV 13 atau vaksin pneumonia, untuk para nasabah dan karyawan.

"Informasi lebih lanjut tentang program ini bisa dilihat di website Prudential.co.id, media sosial resmi dan juga tenaga pemasar Prudential. Vaksin PCV 13 adalah vaksin yang memberikan kekebalan terhadap 13 strain bakteri streptococcus pneumonia yang menyebabkan pneumonia pada manusia," tambahnya. [dre]

Judul	Erick Minta Bantuan Kejagung
Nama Media	Tribun Pekanbaru
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg1&7
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

70 Persen Dana Pensiun BUMN Tidak Sehat

Erick Minta Bantuan Kejagung



TRIBUNNEWS/RAHMAT FARIH NUGRAHA

MINTA BANTUAN - Menteri BUMN Erick Thohir meminta bantuan Kejagung untuk menangani 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN, dalam kategori tidak sehat, Selasa (3/10).

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bantuan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar menangani 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN

dalam kategori tidak sehat. Hal tersebut mengacu pada laporan awal hasil kerjasama antara Kementerian BUMN dengan lembaga penegak hu-

Erick Minta

kum, yakni Kejaksaan Agung dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu 70 persen sakit. Dan 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu, kami berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung walaupun belum secara formal," ucap Erick di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (3/10).

Menurutnya, BUMN dan dana pensiun BUMN harus diselamatkan demi menjaga kestabilan tanggungan yang diberikan kepada pensiunan penerima manfaat. Untuk itu, bersih-bersih dana pensiunan harus dilakukan agar kesejahteraan penerima manfaat tetap terjaga. Di harapkan, transformasi dana pensiunan di BUMN dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan Indonesia.

Kementerian BUMN sebelumnya juga telah membongkar sejumlah kasus keuangan yang bermasalah di Asabri, PT Garuda Indonesia, hingga Jtwasriya. "Pak Jaksa Agung punya komitmen yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh Kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dan Kementerian BUMN mendukung terus program bersih-bersih BUMN," pung-

kasnya.

Erick Thohir melanjutkan atas hal itu pihaknya mencoba memeriksa empat dana pensiun waktu itu, ada PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food. "Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan artinya angka ini bisa lebih besar lagi," jelasnya.

Atas fakta Erick Thohir mengungkapkan kekecewaannya dan turut beresidhi terhadap penstunan BUMN yang berdampak penyelewengan tersebut. "Saya kecewa, sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," tegasnya.

Kemudian dikatakannya bahwa Jaksa Agung punya komitmen untuk tuntaskan tanpa pandang bulu, akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun. "Yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dari Kementerian BUMN dan seluruh mendukung program-program bersih-bersih BUMN dan insya Allah saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini," tuturnya.

Merespons hal itu, Jaksa Agung Santiair Burhanuddin mengungkapkan keke-

Sambungan Hal 1

cewaannya dana penstunan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diselewangkan. "Tadi dikatakan Pak Menteri sekitar Rp 300 miliar tapi itu adalah baru terhitung dan dugaan awal dan tadi disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10 persen perhitungannya," kata Santiair Burhanuddin.

Kemudian diungkapkan angka tersebut bisa terus bertambah tidak hanya Rp 300 miliar. "Tetapi ini bisa berkembang yang pasti jumlahnya tidak bisa kita menentukan, akan terus berkembang lebih dari Rp 300 miliar," sambungnya.

Jaksa Agung mengungkapkan indikasi tindak pidana korupsi di BUMN disebutkan tidak hanya pada dana pensiun. Ia menyebutkan perkara tersebut didahulukan karena menyangkut hidup orang banyak. "Jujur saja masih ada dan banyak bukan hanya dana pensiun saja. Karena memang kami mendahulukan dana pensiun sesuai program kami Kejagung yang menyentuh harakat hidup orang banyak itu yang kami dahulukan," tegasnya.

Burhanuddin mengungkapkan kekecewaannya atas dana pensiun itu masih juga diselewangkan. "Ini adalah untuk penstunan, bayangkan yang penstunan yang sedikit masih saja disalah gunakan oleh oknum tertentu. Ini sangat menyakitkan, untuk itu tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras," tegasnya. (tribun network/bam/rah)

Judul	Sebagian Besar Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Nama Media	Harian Jogja
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

► KEMENTERIAN BUMN

Sebagian Besar Dana Pensiun BUMN Bermasalah

JAKARTA—Sebagian besar dana pensiun yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sekitar 70% dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN saat ini dalam kondisi sakit.

"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu, 70 persen sakit atau 34 [dana pensiun] bisa dinyatakan tidak sehat," kata Erick kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Erick menggandeng Kejaksaan

Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kementerian BUMN untuk program bersih-bersih BUMN. Ia mencurigai ada indikasi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN.

Untuk itu, kata Erick, bersama dengan Wakil Menteri BUMN, asisten menteri dan Diripid membentuk tim untuk meneliti ulang apakah kecurigaan tersebut benar adanya atau tidak.

"Karena itu dengan Bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal, saya sampaikan

indikasi tersebut waktu itu, kemudian bersama-sama mendorong BPKP memastikan angka-angka ini," ujar Erick.

Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menambahkan awalnya ada empat dana pensiun BUMN yang dilakukan audit, yakni Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1, dan RNI atau ID Food. "Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka pihak BPKP dan kejaksaan, artinya angka ini bisa besar lagi," ujar Erick.

Ia menyerahkan hasil audit empat dana pensiun BUMN itu kepada Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan dalam rangka bersih-bersih BUMN. Erick percaya Kejaksaan Agung mempunyai komitmen seperti penuntasan kasus korupsi lainnya di BUMN tanpa pandang bulu. "Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat seluruh oknum yang memang sangat merugikan para pensiunan, yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi

sirna," kata Erick.

Erick menambahkan dirinya dan Kementerian BUMN selalu mendukung Kejaksaan Agung dan BPKP untuk membantu program bersih-bersih BUMN.

Erick Thohir mengaku terus memperdalam upaya "bersih-bersih" di seluruh perusahaan milik negara, termasuk fokus pada pengelolaan dana pensiun BUMN.

Atas perkembangan itu, dia pun menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu audit dana pensiun BUMN tersebut. (Antara)

Judul	Menteri Erick: 70 Persen Dana Pensiun Dikelola BUMN dalam Kondisi Sakit
Nama Media	Bhirawa
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg12
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

Menteri Erick: 70 Persen Dana Pensiun Dikelola BUMN dalam Kondisi Sakit

Jakarta,Bhirawa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sekitar 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN saat ini dalam kondisi sakit.

“Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu, 70 persen sakit atau 34 (dana pensiun) bisa dinyatakan tidak sehat,” kata Erick kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

Erick menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka program bersih-bersih BUMN.

Ia mencurigai ada indikasi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN.

Untuk itu, kata Erick, bersama dengan wakil menteri BUMN, asisten menteri dan Dirut membentuk tim untuk meneliti ulang apakah kecurigaan tersebut benar adanya atau tidak.

“Karena itu dengan Bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal, saya sampaikan indikasi tersebut waktu itu, kemudian bersama-sama mendorong BPKP memastikan angka-angka ini,” ujar Erick. [ant]

Judul	Erick Laporkan 4 BUMN ke Kejagung
Nama Media	Nusa Bali
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg14
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

Diduga Ada Korupsi Dana Pensiun Erick Laporkan 4 BUMN ke Kejagung

JAKARTA, NusaBali

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan sebanyak empat perusahaan yang diduga terindikasi korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Laporan Erick Thohir ini diterima langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Selasa (3/9).

Laporan tersebut merupakan hasil kerja sama 'Bersih-Bersih BUMN' yang telah ditekankan antara BUMN, Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), usai kasus megakorupsi dapen Jiwasraya dan Asabri terbongkar sebelumnya.

"Karena, tetap ada kecurigaan dana pensiun yang dikelola BUMN pun ada indikasi yang sama (seperti kasus Asabri dan Jiwasraya). Maka saya bersama pak Jaksa Agung membentuk tim untuk mengkaji ulang dana tersebut," kata Erick saat jumpa pers, di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan seperti dilansir merdeka.

Menurut dia, pengkajian dana dilakukan berdasarkan perhitungan dan hasil audit BPKP dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN. Hasilnya, 70 persen atau 34 dana pensiun di antaranya, diduga alami kesalahan.

Lalu, dari 34 tadi, ada empat perusahaan yang diduga ada indikasi korupsi atau fraud. Perusahaan tersebut adalah Perhutani, PTPN, Angkasa Pura I dan Id Food. Keempat perusahaan inilah yang dilaporkan



• ANTARA

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat menyampaikan keterangan pers terkait dana pensiun BUMN bermasalah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Erick ke Kejagung.

"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara mencapai Rp 300 miliar tapi berpotensi lebih. Saya kecewa saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, itu (diduga) dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," tutur Erick Thohir.

"Pak Jaksa Agung punya komitmen, Pak Jaksa Agung akan menyikat oknum-oknum yang

merugikan para pensiun yang mana masa tua mereka yang seharusnya cerah menjadi sirna," tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pihaknya telah menerima laporan empat tersebut. Guna setelahnya dilakukan penyelidikan terkait dugaan indikasi fraud atau korupsi pengelolaan dana pensiun.

"Ini kan baru hari ini diserahkan, dan tentunya beri kami

kesempatan untuk mempelajari tentu perlu kami dalam dulu," kata Burhanuddin.

Sementara terkait indikasi kerugian negara, kata Burhanuddin, masih ada kemungkinan bertambah. Karena proses penyelidikan masih akan dilakukan termasuk proses audit bersama BPKP terkait kerugian negara.

"Tadi disampaikan 300 itu kan indikasi awal yang dari hasil pemeriksaan," jelasnya.

Judul	Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Taspen Gandeng 7 Asosiasi BUMD
Nama Media	Harian Tabagsel
Newstrend	Kerja sama TASPEN Group dan BUMD dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Positif

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Taspen Gandeng 7 Asosiasi BUMD

PT DANA Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) melakukan kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan pelayanan publik. Kolaborasi dilakukan dengan 7 asosiasi yang dinaungi BUMD.

Adapun kolaborasi itu dilakukan pada acara BUMD Awards 2023 dan Koordinasi BUMD Seluruh Indonesia. Acara ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat (29/9) yang lalu.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih. Menurut Dirut TASPEN A.N.S. Kosasih kolaborasi ini merupakan komitmen Taspen dalam memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia turut mengapresiasi kinerja Kemendagri yang selalu mendukung Taspen untuk meningkatkan layanan publik.

"TASPEN mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang selalu memberikan ruang kepada TASPEN untuk ikut berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. TASPEN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan masyarakat, oleh karena itu TASPEN berkolaborasi dengan BUMD karena perannya yang penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah.



Diharapkan kerja sama antara BUMN dan BUMD ini dapat meningkatkan kesejahteraan peserta TASPEN, anggota BUMD, dan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023). "Kehadiran TASPEN Group dalam kegiatan BUMD Awards 2023 membuktikan bahwa TASPEN mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan layanan publik untuk memperkuat ekonomi nasional. TASPEN Group dan BUMD di seluruh Indonesia berkomitmen untuk memberikan dampak positif secara berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat," lanjutnya.

Dalam rangkaian acara BUMD Awards 2023 ini, TASPEN Group melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 7 (tujuh) asosiasi, antara lain Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).

Ada juga Perhimpunan Bank

Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (PERBAMIDA), Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), dan Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI).

Selain itu, TASPEN juga melakukan penandatanganan MoU dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (ASPENDA), Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik (FORKALIM), dan Perhimpunan BUMD Aneka Usaha Seluruh Indonesia (PERDASI).

Rencananya TASPEN Group akan bekerja sama dalam hal perlindungan asuransi bagi seluruh anggota BUMD di Indonesia melalui Taspen Life dan akan menyalurkan dana serta kredit bagi seluruh anggota BUMD melalui Bank Mandiri Taspen. Selain itu, Taspen Properti Indonesia akan bekerja sama dalam hal pembiayaan dan pembangunan properti.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menuturkan masyarakat Indonesia harus bangga terhadap upaya BUMD dalam memajukan perekonomian daerah.

"Masyarakat Indonesia patut berbangga atas kontribusi yang telah diberikan oleh BUMD dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan TASPEN Group sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik," papar Agus.

Diketahui, saat ini TASPEN Group telah bekerja sama dengan hampir seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar dari Aceh hingga Papua. TASPEN juga telah bekerja sama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dalam penyaluran pembayaran Manfaat Pensiun kepada ASN di seluruh Indonesia. (dc/int)

Judul	Penyimpangan Dana Pensiun di Dapen BUMN Erick: Dirampok Oknum-oknum Biadab!
Nama Media	Kalimantan Post
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

Penyimpangan Dana Pensiun di Dapen BUMN Erick: Dirampok Oknum-oknum Biadab!

Jakarta, KP - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus memperdalam upaya bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah. Salah satu fokusnya pada pengelolaan dana pensiun (Dapen) BUMN.

Setelah ada kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick mengaku khawatir ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN. Atas dasar kecurigaan itu, Erick menyebut dirinya memerintahkan Kementerian BUMN untuk mengecek langsung dana-dana pensiun BUMN.

Dari 48 dana pensiun, 34 di antaranya atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat. Pada tahap awal, Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan pada empat Dapen BUMN,



Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan 4 dapen BUMN bermasalah kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10). KP/NET

dan ditemukan kerugian Rp 300 miliar.

"Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya

dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," ujar Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa

(3/10) dikutip detikcom.

Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," tegas Erick.

Atas perkembangan ini, Erick menyampaikan terimakasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu audit para Dana Pensiun BUMN tersebut. **(Net/K-1)**

Judul	Bereskan Masalah Jiwasraya, IFG Life Disuntik Rp 6,55 Triliun
Nama Media	Sinar Indonesia Baru
Newstrend	Pengalihan polis ke IFG Life
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Positive

Bereskan Masalah Jiwasraya, IFG Life Disuntik Rp 6,55 Triliun

Jakarta (SIB)

Komisi XI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total senilai Rp 6,55 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) alias Indonesia Financial Grup (IFG). Suntikan modal tersebut untuk menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic mengatakan PMN untuk IFG Life diberikan Rp 3 triliun untuk tahun anggaran 2023 dan Rp 3,55 triliun di tahun anggaran 2024.

"PMN Tunai TA 2023 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3.000 miliar. PMN Tunai TA 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3.556 miliar," tulis kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dan Sri Mulyani,

Senin (2/10/2023).

Seperti diketahui, IFG Life ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jiwasraya untuk kemudian dilakukan pengalihan aset dan liabilitas Jiwasraya yang bersifat *clear and clear* kepada IFG Life.

"Sehingga itu dilakukan injeksi tambahan yang tak terpisahkan juga dengan penegakan hukum Jiwasraya yang sedang berjalan," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan pada dasarnya memerlukan penambahan modal Rp 8,01 triliun untuk menyelesaikan pengalihan seluruh polis yang masih tertinggal. Jumlah itu berdasarkan perhitungan dari konsultan independen yang didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Artinya masih ada kekurangan

sekitar Rp 1,45 triliun dari PMN Rp 6,55 triliun yang diberikan pemerintah. Hal itu akan dipenuhi dengan fundraising yang bersumber dari pinjaman perbankan yang ditargetkan dapat terealisasi pada 2023.

"Pengalihan polis apabila mengandalkan *cashflow* dari situ akan selesai di kuartal I-2024. Tidak ada lagi penambahan PMN (untuk IFG Life karena) pengalihan sudah selesai dengan tuntas," tutur Hexana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (18/9).

Sampai Juni 2023 pengalihan polis telah dilakukan sebesar Rp 30,96 triliun atau 81% dari total liabilitas. Polis yang sudah berpindah dari Jiwasraya ke IFG Life itu disebut sudah mendapatkan hak-haknya sesuai skema restrukturisasi yang ditandatangani kedua belah pihak. *(dokterfinansial)*

Judul	Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Pengelolaan Dapen BUMN
Nama Media	Pos Metro Jambi
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral

Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Pengelolaan Dapen BUMN

JAKARTA - Kejaksaan Agung RI mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Pensiun Badan Usaha Milik Negara (Dapen BUMN) yang perkiaraan sementara merugikan keuangan negara sekitar Rp300 miliar.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta, Selasa, mengatakan angka Rp300 miliar diperoleh berdasarkan hasil sementara audit untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh Kementerian BUMN didukung oleh BPKP terhadap empat Dapen BUMN.

"Disampaikan oleh Pak Menteri BUMN sekitar Rp300 miliar itu baru perhitungan dugaan awal," kata Burhanuddin.

Menurut dia, nilai tersebut baru kisaran awal, diduga nilainya bisa terus berkembang, karena audit yang dilakukan oleh BPKP belum 100 persen.

"Disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10 persen perhitungannya, tetapi ini bisa berkembang yang pasti jumlahnya kami tidak bisa menentukan, karena terus akan berkembang, tetapi yang pasti lebih dari 300 miliar," ujarnya.

Kementerian BUMN melakukan pengecekan langsung pengelolaan dana-dana pensiun BUMN. Dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 di antaranya atau sekitar 70 persen dalam keadaan sakit.

Dari hasil pengecekan itu, Kementerian BUMN meminta BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu.

tu. Tahap awal ada empat Dapen BUMN yang diaudit, yakni Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1 dan RNI atau IDFood.

Hasil audit sementara, keempat Dapen BUMN tersebut mengalami kerugian Rp300 miliar.

Burhanuddin menekankan, Kejaksaan Agung RI mendukung penuh program bersih-bersih BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir.

Setelah penyerahan laporan hasil audit untuk tujuan tertentu tersebut diterima pihaknya, kata Burhanuddin, pihak kembali melakukan perhitungan bersama-sama dengan BPK untuk mengetahui nilai kerugian negara.

"Kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan Pak Menteri BUMN, dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara dan tentunya lagi apabila nanti sudah ada penyerahan ke kami, kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK, apa yang harus kami lakukan dan ini adalah pola sinergi kami Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung dan BPKP," kata Burhanuddin.

Kepala Pusat Penanganan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menambahkan setelah pihaknya menerima laporan dari Menteri BUMN dilakukan penelitian dan pendalaman, selanjutnya dilakukan klarifikasi dan melakukan penyidikan



FOTO: ANTARA

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers terkait Dapen BUMN di Kejaksaan Agung.

umum.

"ini belum penyidikan, setelah ada penyerahan dalam waktu dekat kami akan mempelajari, mengklarifikasi, bila mana perlu kami langsung melakukan penyidikan umum," kata Ketut.

Adapun modus dugaan korupsi yang dilakukan hampir menyerupai kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan ASABRI.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan audit tujuan tertentu merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi yang kami nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami mencoba mengidentifikasi area-area yang beresiko dan memberikan rekomendasi perbaikan," kata Ateh.

Dari empat Dapen BUMN yang diaudit, kata dia, pihaknya mengambil sampling transaksi investasi baru 10 persen dari nilai Rp1,125 triliun. Hasil audit ditemukan transaksi-transaksi investasi dilakukan tan-

pa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, dari empat Dapen BUMN tersebut, dua terindikasi ada "fraud" (kecurangan yang merugikan individu, perusahaan dan ekonomi secara luas) seperti yang dikhawatirkan oleh Menteri BUMN.

"Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu. Dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud," kata Ateh.

Terkait temuan itu, kata Ateh, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar sistem Dapen BUMN tersebut bisa diperbaiki.

"Yang bisa kami lakukan mungkin perbaikan-perbaikan dan mudah-mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki supaya lebih baik lagi," kata Ateh. (ant)

Judul	Sikat Saja, Pak Jaksa!
Nama Media	Mercusuar
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg1&7
Tanggal Berita	2023-10-04
Sentimen	Neutral



ERICK THOHIR

Sikat Saja, Pak Jaksa!

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendalami persoalan dana pensiun (Dapen) BUMN.

Erick mengaku curiga, selain Jiwasraya dan Asabri, ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN lain. Erick juga meng-

Kejaksaan Agung guna mengusut masalah ini.

Ia minta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu. "Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang

Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," ujar Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

A t a s

● Baca **ERICK**
di Hal. 7

ERICK dari hal 1

perkembangan ini, Erick menyampaikan terimakasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu Audit pada Dana Pensiun BUMN tersebut.

Dalam mendalami penyelewengan di Dapen BUMN, Erick memerintahkan jajarannya mengecek langsung dana-dana pensiun BUMN. Erick mendapati dari 48 dana

pensiun, sebanyak 34 di antaranya dalam kondisi tidak sehat.

Erick lekas meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Audit BPKP itu, kata Erick, dilakukan secara bertahap. Dimana pada tahap awal, Audit Dengan Tujuan Tertentu itu dilaksanakan

pada empat Dapen BUMN.

Keempat Dana Pensiun ini, ujar Erick, mengalami kerugian Rp 300 miliar. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya. "Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick geram. REP

Judul	Sidang Gugatan Class Action Dimulai
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Gugatan class action nasabah Wanaartha Life
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

| PENANGANAN ASURANSI BERMASALAH |

Sidang Gugatan *Class Action* Dimulai

Bisnis, JAKARTA — Sidang gugatan perwakilan kelompok (*class action*) nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) dimulai. Mereka berharap keputusan pengadilan bisa memulihkan kerugian nasabah.

Sekitar 150 nasabah dari 504 pemegang polis yang menggugat hadir dengan baju merah maroon bertuliskan 'Pejoeang Sendal Jepit vs Buronan 15,9 Triliun' dalam sidang perdana. Pemegang polis ini berharap, melalui keputusan pengadilan, dapat dilakukan pemulihan kerugian nasabah.

Dalam gugatan ini, nasabah mengajukan *class action* kepada Kementerian Keuangan sebagai tergugat 1, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (tergugat 2), Kejaksaan Agung (tergugat 3), Wanaartha Life

(tergugat 4), dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai turut tergugat.

"Kami mohon supaya pemerintah ada tanggung jawab kepada masyarakat karena kami membeli asuransi atas jaminan dari pemerintah, khususnya OJK," kata Ketua Umum Aliansi Korban Wanaartha Johannes Buntoro Fistanio di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/10).

Dia juga menyebutkan, meski telah ada tim likuidasi yang mendapat persetujuan dari OJK, nasabah tidak memiliki kepastian pembayaran.

Pada perkembangan lain, penjualan dan optimalisasi aset Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk menyelesaikan tunggakan kepada nasabah, masih berproses.

Kepada *Bisnis*, Selasa (3/10),

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah mengatakan perusahaan belum dapat memastikan kapan seluruh aset terjual.

Menurut rencana penyelesaian keuangan perusahaan, AJB Bumiputera menargetkan penyelesaian tunggakan klaim pada 2025. Total tunggakan yang akan dibayarkan mencapai Rp5,29 triliun setelah kebijakan penurunan nilai manfaat (PNM). AJB Bumiputera juga menargetkan perusahaan akan kembali sehat pada 2027.

Beberapa aset yang masih dalam proses penjualan adalah Bumi Surabaya City Resort di Jawa Timur, tanah di kawasan TB Simatupang dan Setiabudi, serta gedung perkantoran yang lokasinya tak disebutkan. (*Rika*

Anggraeni/Pernita H. Untari)

Judul	Perbaikan Tata kelola Dana Pensiun BUMN Mendesak
Nama Media	Kompas
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

Perbaikan Tata Kelola Dana Pensiun BUMN Mendesak

Berbagai pihak mendukung perbaikan tata kelola dana pensiun badan usaha milik negara. Upaya perbaikan itu didukung oleh Kejaksaan Agung.

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai pihak mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memperbaiki tata kelola dana pensiun. Kementerian menemukan 70 persen atau 34 dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Audit dengan tujuan tertentu bersama Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada empat dana pensiun sementara menemukan kerugian Rp 300 miliar.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan dukungannya terhadap aksi Kementerian BUMN dalam upaya memperbaiki dana pensiun di bawah payung BUMN yang bermasalah. Kendati tidak mengelola dana pensiunnya secara mandiri, alokasi anggaran untuk pensiun pegawai PT KAI tetap dikelola lembaga milik negara. Terlebih lagi, sebagian pegawai PT KAI berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"(Perbaikan masalah dana pensiun BUMN) itu penting untuk masa depan pegawai BUMN," ujarnya di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (4/10/2023).

Menurut Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Timboel Siregar, kunc

ci pengelolaan investasi dana pensiun di dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang sehat terletak pada pengawasan. Selama ini, berdasarkan pengamatannya, pengelolaan investasi di DPPK, seperti di BUMN, cenderung kurang diawasi, bahkan untuk urusan syarat penempatan investasi.

Ditambah lagi, karyawan perusahaan yang memiliki DPPK biasanya kurang memiliki akses pengawasan dan informasi penempatan investasi. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan investasi dana pensiun, karyawan relatif pasrah.

"DPPK ataupun dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) tidak bersifat wajib bagi karyawan. Ini berbeda dengan jaminan pensiun (JP) yang sifatnya wajib bagi tenaga kerja penerima upah. Pengelolaan investasi dana JP karena dana pekerja cenderung ketat," katanya.

Timboel berpendapat, penempatan dana investasi dana pensiun semestinya tidak bisa sembarangan. DPPK perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini menempatkan dana investasi JP ke saham-saham yang berkualitas, seperti LQ45. "Kalau asal menempat-

kan ke saham yang gurem, lalu mengatakan investasinya *lost* atau gagal, dampak terbesar kepada karyawan," ujarnya.

Kebijakan investasi Jaminan Hari Tua (JHT) dan JP berdasarkan strategi kebijakan jangka panjang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan, seluruh lini industri keuangan non-bank wajib menggenggam surat utang negara ini berkisar 20-50 persen.

Dalam beleid itu, BPJS Ketenagakerjaan dikenai kewajiban paling besar, yaitu minimal 50 persen dari investasi dana jaminan sosial. Sementara itu, kewajiban terendah dikenakan pada asuransi umum sebesar minimal 20 persen. Hanya DPLK yang dikecualikan dari aturan ini.

Harmonisasi program

"Berulangnya permasalahan pengelolaan investasi dana pensiun BUMN sebenarnya bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk segera mengharmonisasikan seluruh program pensiun. Harmonisasi ini sudah diamanatkan oleh Pasal 189 Ayat (1) UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," kata Timboel.

Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana amanah milik pekerja harus mengedepankan tata kelola yang baik.

"Kami senantiasa menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional, seperti kehati-hatian, akuntabilitas, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program bagi peserta," ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan membukukan kinerja positif. Hingga Agustus 2023, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 38,8 juta. Sebanyak 17,9 juta di antaranya terdaftar dalam program JHT dan 14,2 juta pada JP.

Sebelumnya, Erick dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa, mengatakan, indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Erick mengaku curiga akan kemungkinan penyelewengan

dana serupa yang menjangkiti tubuh dana pensiun BUMN sehingga dilakukan audit pada empat dana pensiun, yakni PT Eksploitasi dan Industri Hutan atau Inhutani, PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara (Persero). Sementara, ditemukan kerugian Rp 300 miliar.

"Tujuan akhirnya bukanlah menemukan dan memenjarakan oknum yang bersalah, melainkan penegakan hukum tetap perlu berjalan seiring upaya perbaikan sistem di tubuh BUMN," ujar Erick (*Kompas*, 4/10).

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP baru mengaudit 10 persen dari total transaksi investasi senilai Rp 1,125 triliun. "Kami menemukan transaksi-transaksi investasi ini, beberapa di antaranya dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik," tuturnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan pihaknya mendukung upaya Kementerian BUMN dalam memperbaiki sistem dan tata kelola perusahaan pelat merah tersebut. (DIM/MED)

Judul	Asuransi Jiwa Genjot Premi
Nama Media	Kontan
Newstrend	Perusahaan Asuransi Jiwa Merilis Produk Baru
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive

Asuransi Jiwa Genjot Premi

Sejumlah perusahaan Asuransi Jiwa merilis produk baru

Arif Ferdianto, Vina Destya

JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi jiwa gencar merilis produk baru. Salah satunya PT Zurich Topas Life. Kemarin, Zurich Topas Life meluncurkan produk baru asuransi tradisional Zurich Plan Protector. Produk ini menawarkan pengembalian premi hingga 200% dari total premi yang dibayar nasabah.

Presiden Direktur PT Zurich Topas Life Richard Ferryanto menyatakan, Zurich Plan Protector juga memberikan solusi perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa dalam satu polis. "Produk ini memberikan nasabah pilihan kapan ingin bayar dan menerima manfaat," katanya, Rabu (4/10).

Di hari yang sama, kemarin, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) juga merilis produk baru bernama PRUAnugerah. Produk ini diklaim memberikan perlindungan seumur hidup atau sampai batas usia 120 tahun, dengan premi dari Rp 500.000 per bulan. "Kami berharap PRUAnugerah membantu nasabah mempersiapkan wari-

san untuk keluarga," ujar Paul Setio Kartono, Direktur Prudential Syariah, kemarin.

Pendapatan premi

Gencarnya perusahaan asuransi jiwa meluncurkan produk baru, salah satunya untuk menggenjot pendapatan premi. Maklum, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendapatan premi asuransi jiwa, khususnya konvensional, masih turun (*lihat tabel*).

Data OJK sejalan dengan realisasi kinerja sejumlah perusahaan asuransi jiwa. Zurich Topas Life, misalnya. Di semester pertama tahun ini, pendapatan premi Zurich Topas Life terkoreksi menjadi Rp 381,6 miliar, dari Rp 400,86 miliar di semester I-2022.

Eben Eser Nainggolan, Plt. Direktur Utama PT BNI Life

Insurance, menyampaikan, produk baru diharapkan terus mendorong pendapatan premi. Sampai Agustus 2023, pendapatan premi BNI Life sudah mencapai Rp 3,65 triliun, naik 7,61% secara tahunan. "Target pendapatan premi sampai akhir 2023 sebesar Rp 5,88 triliun," katanya.

Hingga akhir tahun ini, BNI Life berencana meluncurkan enam produk baru. Pada September lalu, BNI Life telah meluncurkan beberapa produk baru.

Pertumbuhan premi juga dicetak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Per Agustus 2023, Generali mengantongi pendapatan premi Rp 2,04 triliun, tumbuh dari Rp 2,0 triliun per Agustus 2022. "Pertumbuhan kinerja masih positif," kata Vivin Arbianti Gautama, CMO Generali Indonesia. ■

Aset Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah Tahun 2023 (Rp triliun)

Jenis Asuransi Jiwa	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Konvensional	589,26	590,31	586,20	586,25	585,94	587,18
Syariah	35,18	35,35	34,93	35,14	35,06	34,92
Total Aset	624,44	625,66	621,13	621,39	621,00	622,10

Kinerja Asuransi Jiwa Konvensional Tahun 2023 (Rp triliun)

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pendapatan premi	13,86	26,77	39,72	51,16	63,75	75,95	90,04	104,48
Jumlah Investasi	518,14	517,84	514,67	515,23	515,4	516,73	520,25	520,52
Hasil Investasi	2,13	3,15	5,77	8,94	10,89	15,92	21,81	23,66
Beban Klaim dan Manfaat	10,53	22,27	36,78	48,00	61,42	74,92	89,87	103,83
Laba Setelah Pajak	602,86*	1,69	1,51	1,16	1,65	1,83	1,83	3,12

Keterangan: *Rp miliar; Sumber: OJK

Judul	Regulator Turut Digugat Pemegang Polis Wanaartha
Nama Media	Kontan
Newstrend	Gugatan class action nasabah Wanaartha Life
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

Konter

Regulator Turut Digugat Pemegang Polis Wanaartha

JAKARTA. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilayangkan 504 pemegang polis (pempol) sekaligus korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), Rabu (4/10). Adapun, agenda sidang kemarin adalah pemanggilan para tergugat.

Gugatan diajukan para pemegang polis Wanaartha Life pada 14 September 2023. Dalam gugatan dengan Nomor Perkara 609/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst itu, disebutkan pihak tergugat meliputi Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan RI, dan Wanaartha Life.

Kuasa Hukum Pempol Wanaartha Life Firman Wijaya menerangkan, para pemegang polis menuntut agar pihak tergugat, khususnya OJK, bertanggung jawab terhadap raihnya dana asuransi tersebut. Menurut Firman, negara terlambat melakukan mitigasi risiko pemegang polis. Sebab, kerugian nasabah sudah sangat besar.

Tercatat, kerugian para penggugat mencapai Rp 822 miliar dari 1.165 polis. Firman bilang, sampai saat ini, belum ada pembayaran nilai kerugian yang dialami pemegang polis Wanaartha. Pengadilan menunda sidang ini dan kembali menggelar sidang pada 10 Oktober 2023.

Ferry Saputra

Judul	Bank Mandiri Lepas Seluruh Saham di AXA Insurance
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive

Bank Mandiri Lepas Seluruh Saham di AXA Insurance

JAKARTA, ID - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT AXA Insurance (AII) untuk memperkuat konsolidasi anak usaha. *Senior Vice President* Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan, perseroan melepaskan 138.000 saham AXA, atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor BMRI ke AII.

"Masing-masing, 69.000 saham atau mewakili 10% dialihkan kepada Anil Pan-

jwani, dan 69.000 saham atau mewakili 10% dialihkan kepada Manoj Ramkrashin Tolani," kata Rudi dalam keterangan resminya, Rabu (4/9/2023).

Rudi memastikan, transaksi ini bukanlah transaksi afiliasi karena antara perseroan dan Anil Panjwani serta Manoj Ramkrashin tidak memiliki hubungan afiliasi. Praktis, setelah saham dialihkan, perseroan tidak lagi memiliki saham AXA insurance.

Selain itu, Rudi menam-

bahkan, transaksi pengalihan saham ini juga tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha. Pasalnya, nilai penjualan saham tidak mencapai 20% dari total nilai ekuitas.

Menurut Rudi, transaksi pengalihan saham ini merupakan bagian dari strategi perseroan dalam memperkuat konsolidasi anak usaha di Bank Mandiri Group untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal. Mengingat, perseroan sebelumnya telah

melepas 40% saham di AII atau yang dulu dikenal dengan AXA General Insurance, pada November 2018.

"Penting dicatat, transaksi ini tidak akan mengakhiri kerja sama bancassurance oleh perseroan dengan AII dan tidak berdampak pada seluruh kerja sama antara Bank Mandiri dan AXA Group melalui PT AXA Mandiri Financial Services yang bergerak di bidang asuransi jiwa," tutup Rudi. **(mwd/nid)**

Judul	Erick: 70% Dapen BUMN Sakit
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

Erick: 70% Dapen BUMN Sakit

JAKARTA, ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mengungkapkan borok dana pensiun (dapen) BUMN kepada publik. Menurutnya, sebagian besar dapen BUMN dalam kondisi tidak sehat.

Erick pun meminta pelibatan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka program bersih-bersih BUMN.

Ia mencurigai ada indikasi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi dalam pengelola-

an dana pensiun BUMN. Karena itu, Erick bersama dengan wakil menteri BUMN, asisten menteri dan Diripid, kemudian membentuk tim untuk meneliti ulang apakah kecurigaan tersebut benar adanya atau tidak.

"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu, 70% sakit atau 34 (dana pensiun) bisa dinyatakan tidak sehat," kata Erick kepada wartawan, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Pada tahap awal, beber dia, audit untuk tujuan tertentu dilakukan oleh Kementerian BUMN didukung oleh BPKP

pada empat dapen BUMN, yakni Inhutani, PTFN, Angkasa Pura 1, dan RNI atau IDFood. Hasil audit sementara, keempat dapen BUMN tersebut mengalami kerugian Rp 300 miliar.

"Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka pihak BPKP dan Kejaksaan, artinya angka ini bisa (lebih) besar lagi," ujar Erick.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut audit tujuan tertentu merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi yang kami nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami mencoba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan," kata Ateh.

Dari empat dapen BUMN yang diaudit, pihaknya mengamati *sampling* transaksi investasi baru 10% dari nilai Rp 1,125 triliun. Hasil audit ditemukan transaksi-transaksi investasi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, dari empat dapen BUMN tersebut, dua terindikasi ada 'fraud' (kecurangan yang

merugikan individu, perusahaan dan ekonomi secara luas) seperti yang dikhawatirkan oleh Menteri BUMN.

"Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu. Dari kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan, karena tidak semuanya ada indikasi fraud," kata Ateh.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menambahkan, setelah pihaknya menerima laporan dari Menteri BUMN

akan dilakukan penelitian dan pendalaman, selanjutnya dilakukan klarifikasi dan penyidikan umum. "Ini belum penyidikan, setelah ada penyerahan dalam waktu dekat kami akan mempelajari, mengklarifikasi, bila mana perlu kami langsung melakukan penyidikan umum," kata Ketut.

Jika dilihat ke belakang, permasalahan dapen BUMN sejatinya sudah terendus sejak medio 2020, bersamaan dengan meletusnya skandal mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, hingga kini penyelesaian masalah dapen BUMN hanya berjalan di tempat. **(ks)**

Judul	Sekitar 70% Dapen BUMN Diduga Dikorupsi
Nama Media	Pikiran Rakyat
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg9
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

Sekitar 70% Dapen BUMN Diduga Dikorupsi

JAKARTA, (PR).-

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto berharap, pelibatan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mendukung transparansi penyelesaian kasus dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah.

Adapun dana pensiun BUMN yang bermasalah itu merupakan hasil audit BPKP dan telah diserahkan Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Ada empat dana pensiun BUMN yang diaudit bermasalah yakni Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan RNI atau ID Food.

"Ini langkah tepat. Dengan dilibatkannya Kejaksaan dan BPKP, diharapkan bisa membuat transparansi penyelesaian kasus di dapen BUMN ini. Jadi, tidak perlu ada yang ditutupi, tidak juga dalam rangka kepentingan pencitraan Kementerian BUMN," kata Toto Pranoto, di Jakarta, Rabu (4/10/2023), seperti dilansir Antara.

Menurut Toto, melalui keterlibatan kejagung dan BPKP, maka aparat penegak hukum akan sepenuhnya bekerja sesuai prinsip keadilan dan transparansi. "Sehingga penyelesaian kasus manipulasi dapen BUMN bisa diselesaikan tuntas," katanya.

Toto juga berharap penanganan hukum yang adil tersebut, akan dapat memberikan efek jera bagi para



*JAKSA Agung ST Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) saat menyampaikan keterangan pers terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (3/10/2023).**

pelaku kejahatan di BUMN. "Penanganan hukum tanpa tebang pilih ini diharapkan akan bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kerah putih BUMN ini," ujar Toto.

Sementara itu, Kejaksaan Agung RI mengatakan, pihaknya sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dapen BUMN. Kejagung memperkirakan, dari hitungan sementara, kerugian keuangan negara sekitar Rp 300 miliar.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengatakan, angka Rp 300 miliar tersebut diperoleh berdasarkan hasil sementara audit untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, didukung oleh BPKP. Audit ditujukan pada empat dapen BUMN.

Menurut dia, nilai tersebut baru kisaran awal. Diduga, nilainya bisa terus berkembang. Soalnya, audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut, belum 100% selesai.

"Disampaikan oleh Kepala BPKP, baru 10% perhitungannya. Tetapi jumlah ini bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kami tidak bisa menentukan. Soalnya, terus akan berkembang, tetapi yang pasti lebih dari Rp 300 miliar," ujarnya.

70 persen

Kementerian BUMN melakukan pengecekan langsung pengelolaan dana-dana pensiun BUMN. Dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 di antaranya atau sekitar 70%, dalam keadaan sakit.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, sekitar 70% dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN saat ini, dalam kondisi sakit.

"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu, 70 persen sakit atau 34 (dana pensiun) bisa dinyatakan tidak sehat," kata Menteri BUMN Erick Thohir saat melaporkan dugaan korupsi dapen BUMN ke Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Erick menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka program bersih-bersih BUMN.

Ia mencurigai ada indikasi terjadi korupsi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, dalam pengelolaan dana pensiun BUMN. **(Huminca)*****

Judul	SANG PELAKSANA TUGAS MENCICIL TUGAS
Nama Media	Stabilitas
Newstrend	Persiapan Diberlakukannya Program Penjaminan Polis
Halaman/URL	Pg46-49
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive

SANG PELAKSANA TUGAS MENCICIL TUGAS

Lembaga penjamin dana di sektor keuangan mulai mempersiapkan diri menjelang diberlakukannya Program Penjaminan Polis pada 2028. Diharapkan tidak ada peristiwa besar yang mengganggu sistem keuangan di masa-masa persiapan itu.

Oleh: Rornaldus San Utika

Tahun ini semakin menjadi semakin sibuk dengan berbagai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pemerintah akan meluncurkan program penjaminan polis pada tahun 2028. "Kita sudah melakukan persiapan untuk memastikan pelaksanaan program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman," kata Menteri Keuangan Sri Mulya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa saat ini yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. "Kita harus memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko yang akan datang," kata Sri Mulya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman. "Kita akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman," kata Sri Mulya.

Purbaya Yudi Sodewa, Ketua Dewan Komisaris LPS

(Perusahaan asuransi) harus memperbaiki manajemen dan kualitas sehingga begitu masuk nanti jangan sampai tahun pertama jatuh dan kredibilitas pertanggungjawabannya runtuh. Kami tidak mau.

Terdapat juga beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman. "Kita akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman," kata Sri Mulya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman. "Kita akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman," kata Sri Mulya.

LPS yang diserahkan tanggung jawab menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), paling lambat 2028 mulai mempersiapkan diri dari sisi kelembagaan.

Tata Kelola
Direktur Eksekutif Segur Research Institute, Purbaya Yudi Sodewa, mengatakan bahwa lembaga penjamin asuransi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. "Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman," kata Purbaya.

Struktur Baru Lembaga Penjaminan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman adalah dengan melakukan reformasi struktur lembaga penjaminan. "Kita akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa program penjaminan polis berjalan dengan lancar dan aman," kata Sri Mulya.

Adanya pembaruan pembagian fungsi pengurusan dan pengawasan industri keuangan nonbank di OJK membuat OJK bisa lebih fokus mengembangkan masing-masing sektor.

Pier Abdullah Badjalin, Direktur Eksekutif Segur Research Institute

Judul	Pengembalian Premi 200 Persen
Nama Media	Tribun Pekanbaru
Newstrend	Peluncuran Zurich Plan Protector
Halaman/URL	Pg4
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive



PRODUK BARU - Zurich meluncurkan produk baru Zurich Plan Protector yang menawarkan pengembalian premi hingga 200% dari total premi yang dibayarkan.

Pengembalian Premi 200 Persen

● Zurich Luncurkan Produk Zurich Plan Protector

JAKARTA, TRIBUN - PT Zurich Topas Life (Zurich) meluncurkan produk baru Zurich Plan Protector yang menawarkan pengembalian premi hingga 200% dari total premi yang dibayarkan.

Presiden Direktur Zurich, Richard Ferryanto menyatakan Zurich Plan Protector juga memberikan solusi perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa dalam satu polis dengan rencana manfaat yang bisa ditentukan sendiri oleh nasabah. "Kami mengerti kebutuhan

para nasabah dan meluncurkan Zurich Plan Protector yang memberikan nasabah pilihan kapan mereka ingin membayar dan menerima manfaat, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan dengan tenang," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/10).

Richard menjelaskan perencanaan keuangan yang dihidangkan dalam Zurich Plan Protector seperti pembelian aset, pembiayaan, serta waris sesuai dengan rencana kehidupan mereka. Produk ini bisa dimi-

liti oleh rentang usia 30 hari hingga 100 tahun.

Selain itu, lanjut dia, nasabah juga mendapatkan fleksibilitas untuk menentukan masa pembayaran premi mulai dari satu sampai 10 tahun dan manfaatnya bisa didapatkan hingga tahun ke-20.

"Nasabah dapat merencanakan kebutuhan, seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan dana cadangan untuk keperluan yang tidak terduga, dengan pertumbuhan pengembalian

nilai, yang sesuai dengan kebutuhan keluarga yang berbeda-beda sambil mendapatkan perlindungan jiwa," jelasnya.

Sayangnya Richard tak menyebutkan berapa target premi yang bakal dihimpun dari peluncuran produk asuransi baru ini.

"Target kami bisa melindungi masyarakat dan keluarga Indonesia dengan produk kami. Itu kenapa kami ada di sini untuk membangun masa depan lebih cerah," tandasnya. (**Kontan**)

Judul	Empat BUMN Kerugian Rp 300 Miliar
Nama Media	Jateng Pos
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg1&11
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

Divestasi Seluruh Saham AXA Insurance

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah melakukan divestasi kepemilikan sahamnya di PT AXA Insurance Indonesia. Bank berlogo pita emas ini melepas 20% saham di perusahaan asuransi yang dulunya bernama PT Mandiri AXA General Insurance.

Secara rinci, sisa 138.000 saham milik Bank Mandiri dilepas ke dua pemegang saham, Anil Panjwani dan Manoj Ramkrashin Tolani. Masing-masing mendapat 69.000 saham atau sekitar 10% dari modal ditempatkan dan disetor milik AXA Insurance Indonesia.

“Setelah dilakukan pengalihan saham tersebut, maka selanjutnya perseoran tidak lagi memiliki saham di AXA Insurance Indonesia,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha dalam keterbukaan informasi, Rabu (4/10).

Rudi mengungkapkan langkah divestasi ini merupakan bagian strategi dari Bank Mandiri dalam memperkuat konsolidasi perusahaan anak di Bank Mandiri Group.

“Untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal,” ujarnya.

Sebagai informasi, Bank Mandiri sebelumnya sudah pernah mengurangi kepemilikan saham di perusahaan asuransi tersebut. Di mana, pada November 2018, Bank Mandiri telah melepas 40% kepemilikan sahamnya.

Meski telah ada transaksi divestasi ini, Rudi memastikan bahwa itu tidak akan mengakhiri kerjasama bancassurance dengan AXA Insurance Indonesia. Ditambah, itu juga tidak memiliki dampak pada kerjasama dengan perusahaan AXA Group lainnya, PT AXA Mandiri Financial Services. **(kontan)**

Judul	Erick Sebut Biadab Penyelewengan Dana Pensiun
Nama Media	Mata Banua
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	Pg6
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral

Erick Sebut Biadab Penyelewengan Dana Pensiun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terus memperdalam upaya bersih-bersih di tubuh perusahaan-perusahaan negara. Salah satu fokusnya adalah pada pengelolaan dana pensiun (Dapen) BUMN.

Perluasan audit terhadap Dapen BUMN terus dilakukan. Setelah kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick tidak berhenti di situ saja.

"Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir bahwa ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN," ujar Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

Atas dasar kecurigaan itu, Erick menyebutkan, ia memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana-dana pensiun BUMN. Dan ternyata, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 di antaranya atau 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.

Atas temuan itu, Erick terus bergegas. Kali ini, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Audit BPKP itu, kata Erick, dilakukan secara bertahap. Dimana pada tahap awal, Audit Dengan Tujuan Tertentu itu dilaksanakan pada empat Dapen BUMN.

Keempat Dana Pensiun ini, ujar Erick, mengalami kerugian Rp 300 miliar. Penyebabnya diduga adalah penyimpangan pada investasinya. "Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick geram.

Erick pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang ain-main dengan nasib para pensiunan," kata Erick menegaskan. **rep/mb06**

Judul	Berita Foto - PELUNCURAN ZURICH PLAN PROTECTOR
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Peluncuran Zurich Plan Protector
Halaman/URL	Pg13
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive

■ PELUNCURAN ZURICH PLAN PROTECTOR



Bisnis/Abdurachman

Presiden Direktur PT Zurich Topas Life Richard Ferryanto (*tengah*), Chief Agency Officer Banie Zulvanshah (*kanan*), dan Perencana Keuangan Nadia Isnuari Harsya berbincang se usai konferensi pers peluncuran Zurich Plan Protector di Jakarta, Rabu

(4/10). Produk terbaru dari Zurich Topas Life tersebut memberikan solusi perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa dalam satu polis asuransi yang sesuai bagi kalangan profesional dan keluarga dengan rencana manfaat yang bisa ditentukan sendiri oleh nasabah.

Judul	Berita Foto - PELUNCURAN PRUANUGERAH SYARIAH
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Peluncuran PRUANugerah Syariah
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive



Bisnis/Nurul Hidayat

Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono (*kanan*) berbincang dengan Chief Human Resources and Community Investment Officer Indrijati Rahayoe saat peluncuran PRUANugerah Syariah di Jakarta, Rabu (4/10). Peluncuran PRUANugerah Syariah mempertegas kembali komitmen Prudential Syariah

sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah terkemuka di Indonesia dalam memenuhi beragam kebutuhan finansial syariah jangka panjang yang dapat membantu masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan warisan untuk keluarga tercintanya.

Judul	Berita Foto - PERENCANAAN KEUANGAN
Nama Media	Media Indonesia
Newstrend	Peluncuran Zurich Plan Protector
Halaman/URL	Pg11
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positve



PERENCANAAN KEUANGAN:

Presiden Direktur PT Zurich Topas Life Richard Ferryanto memberikan penjelasan dengan disaksikan Chief Agency Officer PT Zurich Topas Life Banie Zulvanshah (tengah) dan perencana keuangan besertifikat Nadia Harsya (kanan) saat pengenalan produk terbaru Zurich Plan Protector saat konferensi pers di Jakarta, kemarin. Zurich Plan Protector memberikan solusi perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa dalam satu polis.

M/AGUS M

Judul	Berita Foto - PRUANugerah Syariah
Nama Media	Kontan
Newstrend	Peluncuran PRUANugerah Syariah
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive

PRUANugerah Syariah



KONTAN/Muradi

Chief Human Resources and Community Investment Officer Prudential Syariah Indrijati Rahayoe bersama Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono saat acara Konferensi Pers Peluncuran PRUANugerah Syariah di Jakarta (4/10). PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) memperkenalkan produk baru asuransi jiwa Syariah tradisional, yakni PRUANugerah Syariah sebagai bentuk persiapan warisan bermakna bagi keluarga Indonesia. Dengan kontribusi mulai Rp 500.000 per bulan, PRUANugerah Syariah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi keluarga Indonesia untuk membantu mereka mempersiapkan warisan hingga bernilai miliaran rupiah.

Judul	Berita Foto - Peluncuran PRUAnugerah Syariah
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Peluncuran PRUAnugerah Syariah
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive



Peluncuran PRUAnugerah Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah Azharuddin Lathif, Chief Risk & Compliance Officer Prudential Indonesia Maria Rosalinda, Chief Human Resources and Community Investment Officer Prudential Syariah Indrijati Rahayoe, Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono, Komisaris Independen Prudential Syariah Irfan Syauqi Beik, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah Ahmad Nuryadi Asmawi saat peluncuran PRUAnugerah Syariah di Jakarta, kemarin. Prudential Syariah menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi beragam kebutuhan finansial syariah jangka panjang keluarga Indonesia.

Judul	Sindo Today - Literasi Keuangan MNC Life
Nama Media	Sindonews TV
Newstrend	Literasi Keuangan MNC Life
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.10/815614707a1786761b9fe25da8aef004b6a10963cda638131d6f89ee276d6820
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive



PT MNC Life Assurance menjanggarakan talkshow tentang pentingnya proteksi finansial untuk bahasar penanar. Keliatan talkshow ini melibatkan para ibu rumah tangga dan juga influencer yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Cookie Class Pastry yang digelar di salah satu hotel di Jakarta diikuti entusias oleh ibu-ibu dan para influencer. Dalam kesempatan ini, MNC Life hadir memberikan literasi keuangan dan perasaan. dalam Toshun yang mengangkat tema pentingnya proteksi finansial untuk masa depan anak. MNC Life mengajak pada orang tua untuk merincangakan keuangan untuk pendidikan anak hingga perguruan tinggi. MNC Life sendiri memiliki program asuransi pendidikan yang diberi nama MNC Tehapan Pintar. Dalam program ini, MNC Life tetap memberikan santunan pendidikan kepada anak dari nasabah yang mengalami tujulakan kerja. Meninggal juga termasuk untuk karena kecelakaan, maka akan mendapatkan lagi sejumlah uang pertanyaan. yang tentunya akan diberikan kepada ahli laris dari nasabah tersebut. Dan ini adalah memberikan perlindungan yang komprehensif kepada nasabah-nasabah kita. Dan itulah kenapa MNC Life memberikan financial literacy di hari ini kepada parah-parahis. Aku sangat terparik banget ya terhadap program-program dari MNC Life sendiri. Karena apa? Karena benar-benar bisa menjadikan usaha buat kita ya menjadi seorang agent gitu kan. Dan juga untuk investasi jangka panjang juga ya asuransi itu. Jadi saya jadi paham gitu sebagai seorang imu juga. dan juga sebagai audienci yang menyimak penjelasan dari MNC LIFE MNC LIFE akan terus menggiatkan literasi keuangan terutama tentang pentingnya perlindungan diri dan investasi lewat produk asuransi Dari Jakarta Irfan Hardian Syahariz Ki Julianto Anius Maporkan

Judul	Newsroom - Erick Thohir Bersih-Bersih Korupsi Di BUMN
Nama Media	CNN Indonesia
Newstrend	Dana Pensiun BUMN Bermasalah
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.10/d2335d480866e283f350788fb65d0014eca2bd630308323da938128d3876a6e9
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Neutral



Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada empat perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun hingga 300 miliar rupiah bahkan bisa lebih sebenarnya lebih lanjut Erik juga mengatakan bahwa dugaan kerugian senilai 300 miliar rupiah tersebut tidak final dan berpotensi bertambah lantaran masih belum dilakukan perhitungan secara menyeluruh oleh Kejaksaan Agung dan juga BPKP dan saya akan bertanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah bergabung malam hari ini di studio CNN Indonesia

Pertanyaan pertama dalam konvers kemarin kalimat yang saya kutip sedikit seperti ini khawatir dan curiga nah dasar apa kecurigaannya ini dasar awalnya apa karena

"karena kemiripan daripada kasus Jiwasraya dan Asabri itu kan investasinya yang disalahgunakan mengharapkan investasi yang kembalinya tinggi tetapi akhirnya menginvestasikan di saham-saham yang justru tidak stabil nah di situlah saya bilang Waduh ini jangan-jangan di dana pensiun perusahaan-perusahaan BUMN juga sama kemiripan sistem penipuannya Nah karena itu sejak awal saya bilang ke tim bentuk Nah setelah dibentuk tim kita bikin konsolidasi review dan standarisasi Nah langsung kita sudah ketahuilah 70% enggak sehat" Sebut Menteri BUMN Erick Thohir

Judul	Lintas iNews Pagi - Perlindungan Dan Kesejahteraan Keluarga
Nama Media	MNC TV
Newstrend	Peluncuran PRUAnugerah Syariah
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.10/218ad8ee92222347ec1810eca49a2f538045fe87e5eac236ba6d748ac6cd232c
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive



Komirsa perencanaan keuangan yang baik dan dilakukan sedih mungkin dapat membantu masyarakat mewujudkan kemandirian funding finansial jangka panjang sehingga masyarakat dapat memperhatikan kesejahteraan keluarga. Keberadaan perudua seransi jiwa syariah dapat disiapkan sebagai bentuk warisan bermakna untuk keluarga Indonesia. Terima kasih kerana menonton. Perluan Ukerah Sariah memperkenalkan produk terbarunya, asuransi jiwa Sariah tradisional, yang ini Perluan Ukerah Sariah sebagai bentuk pasiapan warisan bermakna bagi keluarga Indonesia. Melalui produk ini, Perluan Ukerah Sariah menghadirkan inovasi Sariah pertama di Indonesia dengan manfaat dana usia mapan, yang ini diproyaksikan hingga 100% dari total kontribusi akan dibayarkan sekaligus. Perluan Ukerah Sariah juga memberikan perlindungan semua hidup atau hingga usia sering, 120 tahun. Dengan kontribusi mulai dari 5 ribu rupiah per bulan, Puan Ukra Sariah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia. Dari masyarakat Indonesia itu masih khawatir bagaimana mencanakan untuk usia mapannya. Oleh karena itu dengan hadirnya Puan Ukra Sariah ini, kami membantu masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan usia mapan dan juga untuk mempersiapkan yang bersiapkan warisan kepada keluarga yang dicintainya. Peru Anukerah Sariah memiliki delapan Anukerah bagi para pesertanya, yaitu manfaat jana usia mapan, perlindungan hingga usia 120 tahun, santunan asuransi hingga 150 persen, santunan meninggal akibat kecelakaan hingga 350 persen, serta manfaat bebas kontribusi, fleksibilitas membayar hingga playa kontribusi hingga 50 persen, bahkan layanan wakaf. Benbati Nama, iNews, Melaporkan.

Judul	Seputar iNews Pagi - Asuransi Berbasis Syariah
Nama Media	RCTI
Newstrend	Peluncuran PRUAnugerah Syariah
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.10/5c6cf07571d9104d66d961018dd0249727d81fe9334e7dc0e48f84f8f3654649
Tanggal Berita	2023-10-05
Sentimen	Positive



Perencanaan keuangan yang baik harus dilakukan sedini mungkin agar masyarakat dapat mewujudkan kemandirian finansial jangka panjang. Salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan masyarakat adalah menjadi nasabah produk asuransi jiwa berbasis syariah. Perusahaan Asuransi Ternama, BD Budensial Saria Live Insurance atau Budensial Saria, memperkenalkan produk terbarunya, yaitu Asuransi Jawa Saria Tradisional dengan nama Pru Anugra Saria. Asuransi ini sebagai bentuk persiapan, marisen bermakna bagi keluarga Indonesia. Sebagai pemin pasar Asuransi Jawa Saria, BD Budensial Saria melalui produk ini Menunjukkan Inovasi Saria pertama di Indonesia dengan manfaat dana usia mapan dengan bereksi dana hingga 100% dari total kontribusi yang akan dibayarkan sekaligus. Roduk Asuransi II Saria terbaru ini juga memberikan perlinungan dan terus berjalan seumur hidup atau hingga usia 120 tahun. Parang nasabah hanya perlu membayar kontribusi 500 ribu per bulan untuk bisa mendapatkan perlinungan asuransi peruan usia. Rupiah Sariah, keluarga Indonesia dapat mempersiapkan warisan Indah medlaran Rupiah. Dengan hadirnya Peruan Rupiah Sariah ini, kami membantu masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan usia mapan dan juga untuk mempersiapkan warisan kepada keluarga yang dicintainya. Jadi kami kembali melihat adanya kebutuhan masyarakat, terutama juga untuk layanan finansial yang berbasis Sariah. menuncurkan pro anugria syaria untuk menjawab kebutuhan berlima syaratan. Pro anugria syaria memiliki delapan anugria bagi para pesertanya, antara lain, manfaat dana usia mapan, perlinungan hingga usia 120 tahun, santunan asuransi hingga 150 persen, santunan meninggal akibat kecelakaan hingga 350 persen, serta manfaat bebas kontribusi, fleksibilitas pembayaran hingga biaya kontribusi hingga 50 persen, dan ruka. Mary Janarta, Steven Patinama, melaporkan.

Judul	Cyber crime fears present massive opportunities for the industry: PwC's Jim Bichard
Nama Media	reinsurancene.ws
Newstrend	Technology on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.reinsurancene.ws/cyber-crime-fears-present-massive-opportunities-for-the-industry-pwcs-jim-bichard/
Tanggal Berita	2023-09-26
Sentimen	Positive

Reinsurance News

Cyber crime fears present massive opportunities for the industry: PwC's Jim Bichard

🔥 26th September 2023 - Author: Jack Willard

With cyber crime fears being heavily highlighted in PwC's "Insurance Banana Skins 2023" report, Reinsurance News spoke to Jim Bichard, Partner and Global Insurance Leader at PwC, at RVS 2023 about what the industry needs to do to try and combat these ongoing fears.

"The amount of protection that currently exists for cyber is just a fraction of what could be provided. Although it's a risk for reinsurers, there are also massive opportunities", Bichard said.

"What we find is that corporates want more cover, but they don't know how to obtain it. They don't actually know how to get the insurance in the first place.

"It all starts from the insurance community supporting its customers, small and large businesses, and helping them to understand their risks better, and designing products that can really help them for the future."



Moving forward, with AI being deployed by more companies across the sector, Bichard addresses whether he sees the technology creating more opportunities, or more issues for the industry.

 AmericanAg - Global Reinsurance Solutions

"Everyone gets very excited about the speed of this technology and certain functions of it such as Chat GPT. But what really should be the focus is what problems can this technology actually solve? For example, can it be applied to claims and help settle claims faster, or even predict claims valuation?

"Most of the industry has not got to the stage where they are using AI at any scale, and what they are concerned about is that they don't just want to build AI models for their own sake. Instead they want it to solve problems.

"With AI, it is making everyone think very hard about their protection and data quality, as well as their accessibility to data. It is also making those across the industry think about what are the priority areas where they want to apply AI against."

"There are a number of different areas where AI can be applied. But there are big concerns at the moment in regards to security and control."

Judul	Insurers about to take centre stage
Nama Media	insurancebusinessmag.com
Newstrend	Other on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/columns/insurers-about-to-take-centre-stage-460915.aspx
Tanggal Berita	2023-09-26
Sentimen	Positive

Insurers about to take centre stage

Insurability is not limitless and comes at a price



Columns

By Matthew Connell

Sep 26, 2023 / Share

Insurers are about to take centre stage in debates over sustainability, as the referees of preparedness for climate change.

This is because the economic impacts of global warming will be felt first by households and businesses that cannot buy essential cover.

This process is already underway. September's floods had the biggest economic impact on businesses that had not been able to obtain cover for flooding. By 2039, the same will be true for households unless the government's work on flood defences is adequate, because the public-private subsidy for Flood Re will have come to an end.

Judul	Insurers' Flawed Understanding of ROI
Nama Media	insurancethoughtleadership.com
Newstrend	Other on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.insurancethoughtleadership.com/leadership/insurers-flawed-understanding-roi
Tanggal Berita	2023-09-26
Sentimen	Positive

INSURERS' FLAWED UNDERSTANDING OF ROI

The industry's traditional assessments of "returns" are not suited to the insurance company of the future.

Geoff Martin SEPTEMBER 26, 2023



KEY TAKEAWAYS:

--Insurers often don't fully load their costs, so they miscalculate the "I" (investment) in ROI.

--Companies also need to take a sophisticated look at all their potential returns: on the loss ratio, on retention, on sales and marketing, on the expense ratio, on ratings and on any costs that a new initiative will replace.

I'm fortunate to be constantly engaging with established insurance carriers that are seeking to incorporate technology into their product offerings. Rightly, most carriers seek to understand the potential return on investment (ROI), or the cost-benefit, of new technologies such as our platform, prior to signing contracts and implementing. This is where conversations can get really exciting. However, as a former investment banker and CFO, I can confidently say that the industry's traditional assessments of "returns" are not suited to the insurance company of the future.

Judul	Businesses Unprepared for Cyberattacks Despite Steady Concern
Nama Media	insurancejournal.com
Newstrend	Technology on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.insurancejournal.com/news/national/2023/09/27/741867.htm
Tanggal Berita	2023-09-27
Sentimen	Positive

Businesses Unprepared for Cyberattacks Despite Steady Concern

September 27, 2023



 Email This

 Subscribe to Newsletter



[Article](#)

[0 Comments](#)

Cyber risks remain a top concern for business leaders, according to [the annual Travelers Risk Index](#).

The top concerns among 1,206 survey participants are, in order, medical cost inflation (60%), broad economic uncertainty (59%) and cyber risks (58%). Travelers reported that this marked the ninth straight year that cyber threats were one of the top three concerns.

More than half of respondents believe their businesses will inevitably be victims of cyberattacks.

Judul	AI: Beyond Cost-Cutting, to Top-Line Growth
Nama Media	insurancethoughtleadership.com
Newstrend	Technology on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.insurancethoughtleadership.com/ai-machine-learning/ai-beyond-cost-cutting-top-line-growth
Tanggal Berita	2023-09-27
Sentimen	Positive

AI: BEYOND COST-CUTTING, TO TOP-LINE GROWTH

Call centers will no longer be viewed as cost centers. AI and actionbots will turn these hubs of customer interaction into revenue generators.

Muddu Sudhakar SEPTEMBER 27, 2023



KEY TAKEAWAYS:

- AI and actionbots will break through bottlenecks that can lead a high percentage of callers to drop a connection.
- In call centers, where annual employee turnover can be 100%, generative AI will help get new employees up to speed quickly.
- Actionbots will move AI beyond conversational capabilities to actively executing tasks and streamlining workflows.

The true potential of AI extends far beyond just cutting expenses. The holy grail for businesses, especially in the insurance sector, is the ability to drive top-line growth.

Emerging technologies, particularly generative AI and actionbots, are at the forefront of this trend. It means that call centers will no longer be viewed as cost centers but an opportunity to turn these hubs of customer interaction into revenue generators.

Instead of navigating through a maze of menu options or waiting on hold, customers can interact with AI that will better understand natural language, ask relevant questions and upsell and cross-sell products. The AI will not only streamline the quote-and-buy process

Judul	Human rights abuses often dealbreakers for PE managers
Nama Media	ipe.com
Newstrend	Other on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.ipe.com/news/human-rights-abuses-often-dealbreakers-for-pe-managers-ap6-finds/10069128.article
Tanggal Berita	2023-09-27
Sentimen	Positive

NEWS

Human rights abuses often dealbreakers for PE managers, AP6 finds

BY RACHEL FIXSEN | 27 SEPTEMBER 2023

Uptake of the UN's guiding principles on business and human rights is not widespread in the sector, according to Swedish national pension fund's deep dive



Judul	Unveiling corporate influence in climate policy: A call for genuine leadership
Nama Media	euractiv.com
Newstrend	Climate on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/unveiling-corporate-influence-in-climate-policy-a-call-for-genuine-leadership/
Tanggal Berita	2023-09-29
Sentimen	Positive

Unveiling corporate influence in climate policy: A call for genuine leadership

DISCLAIMER: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

By [Anja Hazekamp](#) ⌚ Est. 4min

📅 Sep 28, 2023

Content-Type: Opinion



Wopke Hoekstra's proposed appointment as the next EU climate commissioner risks undermining the bloc's Green Deal, argues Anja Hazekamp. [Shutterstock/Denis Junker]

📄 EURACTIV is part of the Trust Project >>>



Wopke Hoekstra's proposed appointment as the next EU Climate Commissioner risks undermining the bloc's Green Deal, argues Anja Hazekamp.

Judul	PRA consults on reforms to Solvency II Matching Adjustment
Nama Media	reinsurancene.ws
Newstrend	Other on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.reinsurancene.ws/pru-consults-on-reforms-to-solvency-ii-matching-adjustment/
Tanggal Berita	2023-09-29
Sentimen	Positive

Reinsurance News

PRA consults on reforms to Solvency II Matching Adjustment

🕒 29th September 2023 - Author: Kane Wells

The Prudential Regulation Authority (PRA) has announced it is consulting on a significant package of reforms to the Matching Adjustment (MA) to "improve the flexibility for life insurers to make more productive, long-term investments in the UK economy while supporting safety and soundness and policyholder protection."

The PRA said the proposals cover reforms to MA regulations relating to greater investment flexibility and revised eligibility rules and more flexibility in MA processes, along with risk management enhancements, a greater role for senior manager responsibility including through attestations, and certain changes to MA calculation and reporting.

According to the Authority, the proposed reforms "improve insurers' investment flexibility by enabling broader and quicker investments by insurers in their MA investment portfolios, while supporting the PRA in holding insurers to account for managing the additional risks involved, through a range of proportionate supervisory measures."

The PRA noted that the reforms, working with upcoming legislation, will facilitate greater investment freedom by insurers to increase their investments in productive finance, from 2024 onwards.

Sam Woods the Deputy Governor for prudential regulation, commented, "We propose to adjust regulations to reflect the decisions made by the Government about the level of financial resilience that should be required of insurance companies."



Judul	Negotiating the scope of human rights due diligence in the UN binding treaty & the EU CSDDD
Nama Media	business-humanrights.org
Newstrend	Other on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.business-humanrights.org/en/blog/negotiating-the-scope-of-human-rights-due-diligence-in-the-un-binding-treaty-the-eu-csddd/
Tanggal Berita	2023-09-29
Sentimen	Positive

Opinion

Negotiating the scope of human rights due diligence in the UN binding treaty & the EU CSDDD



As [trilogue negotiations](#) for the proposed [EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive](#) (CSDDD) continue and an [updated draft of the UN legally binding instrument on business and human rights](#) (UN Treaty) was recently published in advance of the 9th working group session in October, there is an opportunity to influence both [debates](#) and negotiations. While the two proposed instruments have different scope, it is imperative they [align and complement each other](#). Here, we discuss three aspects related to mandatory human rights and environmental due diligence (mHREDD) requirements in both drafts and consider ways in which these two proposals can be further strengthened through alignment.

Climate change

First, amid a climate change crisis, UN bodies are increasingly recognising climate change affects the enjoyment and realisation of all human rights – both directly and indirectly. While the [UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#) (UNGPs) did not address climate change or environmental rights explicitly, [the UN Working Group on business and human rights has clarified](#) States and business have obligations and responsibilities in relation to human rights harms linked to climate change. Likewise the [2011 OECD Guidelines on Multinational Enterprises](#) did not reference climate change – but the

Judul	Solving Systemic Risk Is the Cyber Market's Number One Priority
Nama Media	insurancejournal.com
Newstrend	Technology on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.insurancejournal.com/magazines/mag-features/2023/10/02/741756.htm
Tanggal Berita	2023-10-02
Sentimen	Positive

Solving Systemic Risk Is the Cyber Market's Number One Priority

By James Burns | October 2, 2023



[Email This](#) [Subscribe to Newsletter](#)



[Article](#)

[0 Comments](#)

Cyber insurers can sometimes feel like systemic risk is unique to them. It isn't. The COVID-19 pandemic was about as systemic as it gets. Business interruption (BI) insurers faced an avalanche of claims following the first lockdowns. And the industry failed in the eyes of thousands of small business owners. The reason was a failure to address the perennial problem of systemic risk. The cyber market mustn't repeat the same mistakes.

Insurers have always fretted about systemic risk: exposure to a single event that triggers an enormous number of claims and a colossal, accumulated financial loss. The 1906 San Francisco earthquake spawned over 100,000 claims, costing insurers

Judul	The Government Pension Investment Fund of Japan Uses ICE for Impact Bond and Avoided Emissions Assessment of its Portfolio
Nama Media	fintechfutures.com
Newstrend	Other on GFIA monitoring bulletin
Halaman/URL	https://www.fintechfutures.com/techwire/the-government-pension-investment-fund-of-japan-uses-ice-for-impact-bond-and-avoided-emissions-assessment-of-its-portfolio/
Tanggal Berita	2023-10-02
Sentimen	Positive

Business Wire

The Government Pension Investment Fund of Japan Uses ICE for Impact Bond and Avoided Emissions Assessment of its Portfolio

Distributed by Business Wire 2nd October 2023



ATLANTA & LONDON & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE), a leading global provider of data, technology, and market infrastructure, today announced it was selected by The Government Pension Investment Fund of Japan (GPIF), the world's largest pension fund, to conduct an impact assessment of the fund's investment in impact bonds, which was used by GPIF in its [recently published 2022 ESG Report](#).



ICE conducted an impact assessment of the impact bonds in GPIF's portfolio, which covered various impact categories from emissions reduction and renewable energy generation to social impact, including job creation. GPIF published a report detailing ICE's impact assessment, which includes calculated impact metrics per US dollar amount invested.

"We are committed to developing sustainable finance products and datasets that allow investors to not only manage their climate risks but also help quantify the potential impacts of their portfolios," said Girish Narula, Head of Sustainable Finance, ICE. "We are pleased to have been able to support GPIF in quantifying the potential impact of its investment in impact bonds and its avoided emissions. We will continue to work with customers to provide our data analysis, modelling, and comparative scenario analysis capabilities to measure and understand climate and investment risks and opportunities."